

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di wilayah tenggara Benua Asia yang merupakan suatu negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk 241.452.952 jiwa pada akhir tahun 2014 menurut Badan Pusat Statistik (BPS), dengan jumlah penduduk yang sebanyak itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke 4 di dunia. Jumlah penduduk yang banyak tersebut, di tambah dengan letak geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau menjadikan Indonesia mempunyai aneka ragam budaya, dan mata pencaharian, akan tetapi saat ini muncul suatu fenomena baru dimana banyak Warga Negara Indonesia (WNI) dari tiap-tiap daerah yang berangkat mencari pekerjaan di luar negeri yang disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). TKI merupakan orang-orang yang menjadi pekerja yang mencari pekerjaan ke negara lain, yang pada umumnya kebanyakan menjadi jasa Pembantu Rumah Tangga (PRT) dan buruh.

TKI saat ini mengalami pergantian istilah menjadi Buruh Migran Indonesia (BMI), hal ini dikarenakan para TKI ingin mendapatkan kesetaraan dengan penyebutan BMI, istilah BMI pertama kali dideklarasikan oleh TKI-TKI yang bekerja di Hongkong yang meminta penyebutan istilah TKI dihapus dan diganti dengan BMI pada tahun 2013, hal ini dikarenakan para TKI selalu mendapatkan kesulitan-kesulitan ketika berada di bandara. Penempatan dan perlindungan TKI saat ini diatur

melalui Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2004, saat ini keberadaan TKI tersebar hampir diseluruh daerah yang ada di Indonesia, bukan hanya pulau jawa saja yang merupakan sebagai penyumbang terbesar tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, tetapi juga di daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia, banyaknya jumlah TKI yang bekerja di luar negeri sebenarnya memberikan dampak positif bagi perekonomian Negara Indonesia. Dampak positif dari banyaknya TKI yang dikirim ke luar negeri memberikan pemasukan-pemasukan yang signifikan bagi negara, TKI merupakan salah satu penyumbang terbesar devisa negara yang dapat membangun perekonomian negara.

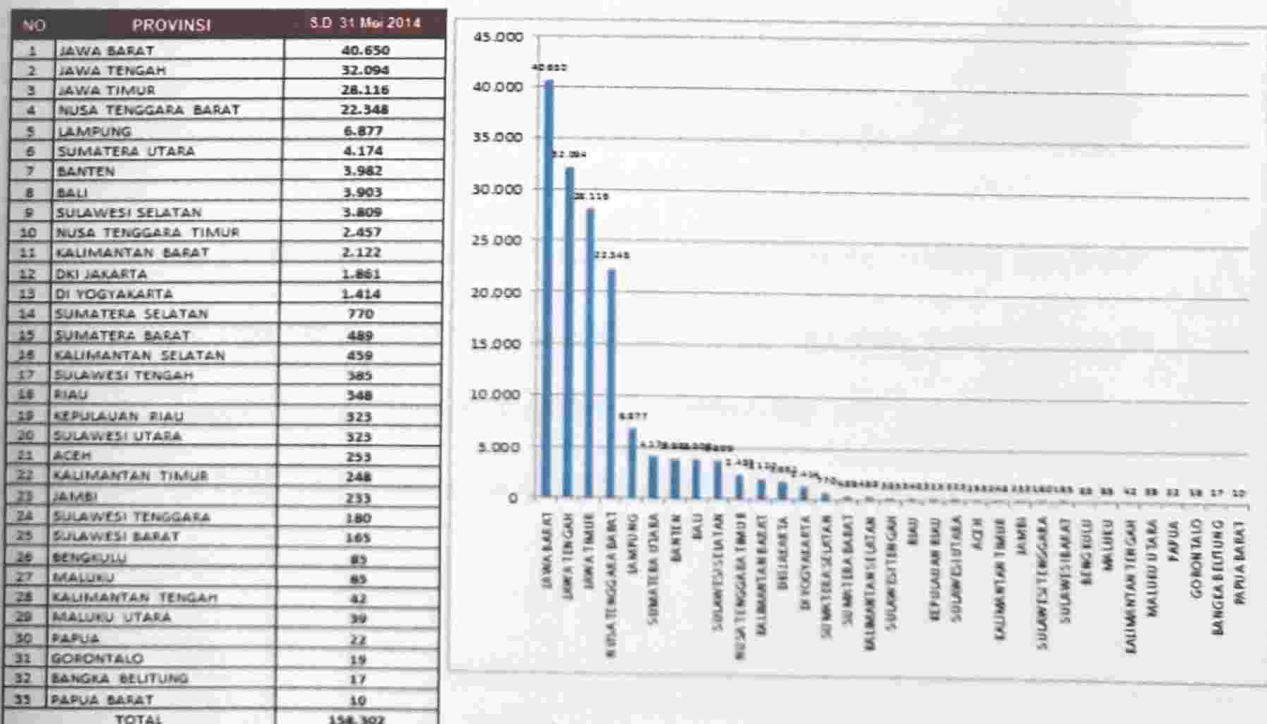
TKI yang bekerja di luar negeri sementara itu dapat memberikan dampak negatif bagi keluarga yang ditinggalkan, di Indonesia sendiri jumlah TKI yang bekerja di luar negeri mayoritas adalah Tenaga Kerja Wanita (TKW), dimana banyak ibu rumah tangga yang meninggalkan keluarga dan anak-anaknya yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap anak-anaknya dalam masa pertumbuhan yang dapat mengarah pada perkembangan yang negatif karena kurangnya peran dari orang tua. Dampak negatif dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja di luar negeri juga mengarah kepada hubungan rumah tangga yang seringkali mengalami perceraian yang juga dapat mempengaruhi moral anak bagi pasangan yang sudah menikah dan mempunyai anak.

Pelaksanaan kebijakan TKI saat ini dikelola oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang merupakan lembaga pemerintah non departemen yang ada di Indonesia yang melaksanakan urusan TKI

secara nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Tugas pokok BNP2TKI diantaranya adalah melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara penempatan TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan, memberikan pelayanan, mengkoordinasikan serta pengawasan jalannya proses pemberangkatan TKI seperti pembekalan, biaya, dan pemulangan TKI agar dapat meningkatkan kualitas TKI dan kesejahteraan TKI.

Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang paling banyak menyumbang TKI di luar negeri dari seluruh Provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Jawa Barat menempati urutan teratas dalam jumlah TKI yang ditempatkan di luar negeri, baik itu TKI formal maupun TKI informal, dan hal tersebut dapat dilihat dari data yang peneliti dapat dari BNP2TKI berikut :

**Gambar 1.1**  
**Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Berdasarkan Provinsi**  
**S.D. 31 Mei 2014**



(Sumber : Data BNP2TKI Tahun 2014)



Kabupaten Subang sendiri merupakan salah satu kabupaten yang sedang berkembang di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang layak disebut sebagai basis Tenaga Kerja Indonesia (TKI) setelah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu di Jawa Barat yang merupakan daerah dengan penyumbang TKI terbesar, hal ini dapat di lihat dari data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut :

**Gambar 1.2**  
**Jumlah TKI Kabupaten Subang Tahun 2015**

**REKAPITULASI REGISTRASI BERDASAR NEGARA PENEMPATAN  
KABUPATEN/KOTA SUBANG  
01 Januari 2015 s.d. 30 Juni 2015**

NO.	NEGARA PENEMPATAN	INFORMAL			FORMAL			TOTAL
		P	L	JML	P	L	JML	
1	BAHRAN	4	0	4	0	0	0	4
2	BRUNA DARUSSALAM	18	0	18	1	0	1	19
3	HONG KONG	238	0	238	0	0	0	238
4	MALAYSIA	115	0	115	48	33	82	197
5	CHINA	128	0	128	0	0	0	128
6	QATAR	0	0	0	4	0	4	4
7	SAUDI ARABIA	0	0	0	5	1	6	6
8	SINGAPURA	333	0	333	0	0	0	333
9	TAIWAN	1700	4	1704	17	105	122	1836
10	UNITED ARAB EMIRATES	0	0	0	4	0	4	4
	Jumlah	2928	4	2932	88	138	218	2751

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2015*

Gambar di atas dapat di lihat jumlah TKI dari Kabupaten Subang dari bulan Januari sampai Juni tahun 2015, mempunyai total 2751 TKI yang pergi bekerja ke luar negeri, dengan Taiwan sebagai negara tujuan mayoritas TKI Kabupaten Subang dengan jumlah 1836 TKI. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah hingga akhir

tahun 2015, dan juga jumlah TKI tersebut masih akan bertambah apabila TKI yang berangkat secara ilegal juga terdata

Penempatan dan perlindungan TKI asal Jawa Barat saat ini diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2013, mayoritas penduduk di Kabupaten Subang merupakan penduduk yang berprofesi sebagai petani dan buruh, dengan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi yang merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan meningkatnya jumlah TKI yang bekerja di luar negeri.

JPNN.COM – Kabupaten Subang Jawa Barat layak disebut basis TKI, ini dibuktikan masih tingginya warga memilih bekerja di luar negeri, ketimbang di negeri sendiri. Selama kurun waktu tahun 2014, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang mencatat telah memberangkatkan sebanyak 2.723 orang TKI ke sejumlah Negara, jumlah tersebut baru 40 persen dari jumlah TKI yang diberangkatkan pada tahun 2013 lalu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, Kusman Yuhana Natasapura menuturkan, hingga tanggal 15 juli tahun 2014, ada sebanyak 2723 orang pekerja asal Kabupaten Subang yang berangkat ke luar negeri. “Hingga bulan juli, ada sebanyak 2723 orang yang berangkat ke 10 negara di kawasan timur tengah dan asia, seperti Bahrain, Brunei, Hongkong, Malaysia, dan Saudi”.

Dari 10 negara tujuan, Taiwan merupakan menjadi favorit dengan jumlah terbanyak, sebanyak 1.643 orang TKI, dan dari jumlah tersebut tercatat hanya 173 orang sebagai TKI formal. “Taiwan di dominasi pekerja informal, yaitu 1.470 orang TKI, dengan perincian 1.461 perempuan, dan 9 laki-laki”, jelasnya.

(Sumber : <http://jpnn.com/news.php?id%3D246445&e1=eZN6u2g-&lc=id-ID&s=1>)

Penyelenggaraan penempatan dan pelatihan TKI yang akan berangkat keluar negeri di Kabupaten Subang saat ini diselenggarakan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang berkoordinasi dan dibawah pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Subang yang merupakan penyelenggara urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Subang. Calon Tenaga Kerja

Indonesia yang hendak berangkat ke luar negeri wajib memberikan data diri ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang untuk di daftarkan sebagai calon tenaga kerja yang kemudian akan di seleksi berdasarkan umur, tinggi badan, kesehatan, dan pendidikannya.

Pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Subang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Sebagai penyelenggara urusan pemerintah dibidang ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Subang diharapkan mampu mengawasi dan memberikan pelayanan terhadap jalannya pembinaan TKI yang dilakukan oleh PJTKI yang telah diatur mengenai tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi melalui Peraturan Bupati Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Subang.

Penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Subang saat ini masih mengalami banyak kendala, salah satunya tidak berjalannya balai pelatihan TKI yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang karena saat ini pelatihan-pelatihan TKI lebih di dominasi oleh PJTKI. Pelatihan yang dilakukan oleh PJTKI di Kabupaten Subang sendiri masih banyak terdapat pelatihan-pelatihan ilegal yang tidak mempunyai izin yang terdaftar pada Disnakertrans Kabupaten Subang atau juga BNP2TKI.

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang dalam mengawasi tempat-tempat pelatihan ilegal di Kabupaten Subang masih sangat lemah,



tempat-tempat pelatihan ilegal tersebut biasanya merupakan tempat pelatihan yang menampung tenaga kerja-tenaga kerja dibawah umur atau juga calon tenaga kerja yang tidak memenuhi persyaratan baik itu dalam hal tinggi badan maupun pendidikan, begitu juga dalam pengawasan dalam perekrutan TKI yang dilakukan oleh agen-agen penyalur TKI yang masih banyak terdapat agen-agen ilegal yang tidak mempunyai surat izin dalam merekrut TKI. Calon TKI yang masih awam dapat menghadapi penipuan secara materi, serta dapat mengarah pada perdagangan manusia, seperti yang diberitakan oleh media fokusjabar.com sebagai berikut :

FOKUSJABAR.COM- Ketua Forum Keluarga Buruh Migrant Indonesia (FKBMI) Kabupaten Subang, Supendi mengatakan, sebagai daerah basis pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Kabupaten Subang sangat rawan dengan calon TKI ilegal, khususnya sejumlah Kecamatan di wilayah Pantai Utara (Pantura). “Setiap desa terdapat sekitar 5 hingga 10 calo TKI, mereka membujuk warga miskin untuk menjadi TKI atau TKW dengan iming-iming gaji besar”, ungkap supendi saat di temui di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang. Akibat minimnya pengawasan saat perekrutan dari instansi terkait tersebut, tak jarang setelah di luar negeri TKW bersangkutan malah bermasalah, sebut saja Dasni, TKW asal Desa Patimban Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, yang saat ini bekerja di Yordania, selama satu tahun ini ia sedikitnya sudah bergonta-ganti majikan sebanyak 4 kali. “ini dari satu dari puluhan TKW yang keluarganya mengadu kepada kami”, kata Supendi. Selain itu juga masih banyak TKW yang tidak menerima gaji, dan mendapatkan perlakuan kasar dari sang majikan di negara tempat bekerja.

(Sumber : <http://fokusjabar.com/2013/05/09/pamtura-subang-rawan-calon-tki-ilegal/>)

Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang dalam melakukan sosialisasi sangat penting agar para calon tenaga kerja yang akan berangkat ke luar negeri dapat memahami dan dapat membedakan bagaimana proses pemberangkatan tenaga kerja secara legal dan pemberangkatan tenaga kerja yang

ilegal, akan tetapi saat ini implementasi mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang kepada para calon tenaga kerja masih sangat minim.

Permasalahan yang ada mengenai calon tenaga kerja yang ada di Kabupaten Subang saat ini dipengaruhi oleh kinerja aparatur Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang yang dapat peneliti uraikan sebagai berikut :

Faktor individu aparatur Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang yaitu kemampuan aparatur yang masih belum secara maksimal menyalurkan kemampuannya dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat Kabupaten Subang secara langsung, sehingga tingkat pengetahuan masyarakat masih sangat minim mengenai proses menjadi TKI secara baik dan benar, tingkat pengetahuan yang minim tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya agen-agen TKI yang tidak memiliki izin resmi melakukan rekrutmen TKI di Kabupaten Subang, sehingga masih banyak TKI Kabupaten Subang yang bekerja di luar negeri berangkat dengan proses yang ilegal.

Permasalahan yang telah peneliti paparkan di atas tersebut, maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan mengenai kinerja aparatur, oleh karena itu peneliti mengambil judul Skripsi ini yaitu “Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Membina Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Subang”.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas mengenai permasalahan pembinaan tenaga kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, maka untuk mempermudah arah proses pembahasan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana individu aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Membina Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Subang?
2. Bagaimana lingkungan organisasi Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Membina Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Subang?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian yang dibuat oleh peneliti adalah untuk mengetahui dan menggambarkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membina Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Subang, sementara itu tujuan dibuatnya penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui individu aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membina Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Subang
2. Untuk mengetahui lingkungan organisasi aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membina Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Subang

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Bagi kepentingan peneliti, hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengalaman, wawasan, pengetahuan, dan memahami Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membina Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Subang.
2. Bagi Ilmu Pemerintahan sendiri, hasil penelitian ini untuk mengembangkan teori-teori yang peneliti gunakan secara relevan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan khususnya mengenai kinerja aparatur
3. Bagi lembaga, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk meningkatkan kinerja aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membina Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Subang.